

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dalam kurun waktu 2023–2024, International Organization for Migration (IOM) telah mengimplementasikan berbagai program strategis untuk menanggulangi masalah perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kompleksitas TPPO yang bersifat lintas batas, multidimensi, dan melibatkan aktor transnasional. Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan kerja sama regional, IOM berupaya memperkuat kapasitas negara sekaligus memberdayakan masyarakat. Implementasi program ini menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang tidak bisa hanya dilakukan secara nasional, melainkan membutuhkan dukungan organisasi internasional yang memiliki jaringan global, sumber daya teknis, serta legitimasi normatif.

Program pertama adalah Proyek AMPUH, yang fokus pada pemulihan dan pemberdayaan korban perdagangan orang melalui dukungan psikososial, pendidikan, dan keterampilan kerja. Proyek ini menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dipulihkan martabat dan kapasitasnya, bukan sekadar objek bantuan. Dengan pemulihan yang menyeluruh, korban dapat kembali berdaya dalam kehidupan sosial maupun ekonomi sehingga mengurangi risiko terjebak kembali dalam lingkaran eksploitasi. Program kedua adalah Pedoman Teknis untuk Dukungan Psikososial bagi Korban Laki-laki (2021–2023). Program ini lahir dari kesadaran bahwa korban laki-laki seringkali luput dari perhatian, padahal mereka juga rentan mengalami eksploitasi kerja paksa dan perbudakan modern. Dengan penyusunan pedoman ini, IOM mendorong pengakuan hak korban laki-laki sekaligus memperluas cakupan perlindungan. Program ini memperkuat aspek inklusivitas dalam penanganan perdagangan orang di Indonesia. Program ketiga adalah Kembalikan dan Integrasi Kembali (2024): Dukungan bagi Migran Rentan. Fokus utama program ini adalah memastikan migran yang menjadi korban TPPO atau migrasi tidak aman dapat kembali ke negara asal dengan aman serta memperoleh dukungan integrasi sosial-ekonomi. Melalui layanan repatriasi, konseling, hingga bantuan ekonomi, program ini

**Nurul Aida Amalia, 2025**

***UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM  
PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2023- 2024***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

membantu memutus siklus kerentanan migran yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Program keempat adalah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 2020–2024) yang menjadi kerangka strategis nasional dalam memerangi perdagangan orang. Program kelima berupa Kampanye dan Pelatihan Kesadaran Masyarakat, yang menekankan pentingnya edukasi publik untuk mencegah terjadinya TPPO sejak dini. Sedangkan program keenam, yaitu Dialog Regional tentang TPPO dan Pusat Penipuan Daring, menegaskan peran IOM sebagai fasilitator kerja sama antarnegara dalam menghadapi modus eksploitasi baru yang berbasis teknologi digital.

Dari implementasi keenam program tersebut, terlihat bahwa IOM berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pencegahan, perlindungan, hingga kerja sama lintas batas dalam isu perdagangan orang di Indonesia. Sinergi program yang menasar individu korban, masyarakat, hingga kebijakan negara ini secara langsung berdampak pada menurunnya jumlah kasus human trafficking di Indonesia pada tahun 2023–2024. Penurunan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan langkah nyata dalam memerangi perdagangan orang sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak asasi manusia.

## **VI.2 Saran**

### **VI.2.1 Saran Praktis**

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu saran utama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia adalah perlunya memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, serta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Saat ini, meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di berbagai tingkatan, koordinasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih solid, berbasis data terpadu, serta mekanisme kerja yang jelas dan mengikat antar instansi agar respons terhadap perdagangan

manusia dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Selain itu, dukungan hukum dan anggaran untuk program pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia juga perlu ditingkatkan secara signifikan. Penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bukti, minimnya pelatihan petugas, dan lemahnya perlindungan bagi korban yang menjadi saksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak korban dan memperberat hukuman bagi pelaku. Di sisi lain, alokasi anggaran yang memadai juga menjadi kunci untuk menjamin keberlangsungan program-program pencegahan, pelatihan, reintegrasi, dan bantuan hukum, khususnya di daerah-daerah rawan perdagangan orang.

Langkah-langkah tersebut akan memperkuat kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar internasional dan akan mendukung kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM secara lebih efektif. Kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, didukung dengan kerangka hukum dan pendanaan yang jelas, akan menciptakan sistem pencegahan dan perlindungan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berpihak kepada korban. Sebagai organisasi internasional yang berperan penting dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia, *International Organization for Migration* (IOM) disarankan untuk terus meningkatkan jangkauan program ke daerah-daerah yang rawan trafficking, terutama wilayah dengan tingkat migrasi tinggi, minim akses informasi, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah Sumatra masih menjadi kantong-kantong kerentanan, di mana praktik migrasi non-prosedural dan eksploitasi tenaga kerja kerap terjadi. Memperluas jangkauan ke wilayah ini sangat penting agar intervensi tidak hanya terpusat di kota-kota besar atau daerah yang sudah memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai.

Selain perluasan cakupan geografis, IOM juga perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas program-programnya agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini mencakup penyesuaian materi kampanye dengan konteks budaya, penyusunan modul pelatihan yang sesuai dengan karakteristik aparat daerah, serta penyempurnaan mekanisme bantuan langsung kepada korban.

Evaluasi ini penting agar setiap kegiatan tidak bersifat generik, melainkan mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas lokal dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Pendekatan yang responsif dan berbasis bukti akan meningkatkan keberhasilan program dalam jangka panjang.

IOM disarankan untuk memperkuat pelibatan masyarakat sipil dan organisasi akar rumput dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Organisasi lokal, termasuk kelompok perempuan, komunitas agama, dan jaringan migran, memiliki peran krusial dalam mendeteksi dini kasus trafficking, memberikan edukasi berbasis komunitas, serta memfasilitasi proses reintegrasi korban. Kolaborasi yang erat dengan aktor-aktor lokal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pencegahan. Dengan demikian, program IOM akan lebih berkelanjutan dan relevan dengan realitas sosial di lapangan.

Dalam konteks upaya pemberantasan perdagangan manusia yang bersifat lintas negara, kerja sama multilateral menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, disarankan agar kolaborasi regional antara Indonesia, IOM, dan negara-negara tetangga terus diperkuat melalui berbagai mekanisme kerja sama kawasan, seperti *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, ASEAN, dan APEC. Forum-forum ini dapat digunakan tidak hanya sebagai sarana dialog kebijakan, tetapi juga sebagai wahana berbagi praktik baik, penyelarasan prosedur antar negara, serta peningkatan kapasitas kolektif dalam menangani kasus-kasus lintas batas.

Melalui Bali Process, misalnya, IOM dan Indonesia dapat mendorong terbentuknya protokol regional mengenai perlindungan korban dan repatriasi aman, yang menjadi tantangan umum di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik. Begitu pula dalam kerangka ASEAN, kerja sama dapat diarahkan untuk memperkuat implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*, serta mendorong negara anggota mempercepat harmonisasi hukum dan prosedur nasional. Partisipasi aktif dalam forum-forum ini juga penting untuk menggalang komitmen politik yang lebih tinggi dari negara-negara anggota dalam menangani akar masalah trafficking, seperti kemiskinan, kesenjangan pembangunan, dan migrasi tidak aman.

Selain memperkuat partisipasi dalam kerja sama yang telah ada, disarankan agar Indonesia dan IOM berperan lebih aktif dalam proses pembentukan norma dan kebijakan regional yang bersifat preventif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara sumber dan transit migran memiliki posisi strategis untuk menginisiasi kebijakan yang lebih progresif dan berbasis perlindungan. Sementara itu, IOM sebagai aktor internasional memiliki legitimasi dan kapasitas teknis untuk memberikan asistensi dalam penyusunan standar operasional, kerangka kerja bersama, serta penguatan institusi di tingkat regional. Sinergi antara keduanya akan memperkuat posisi kawasan Asia Pasifik dalam melawan perdagangan manusia secara sistemik dan berkelanjutan.

### **VI.2.2 Saran Akademis**

Sebagai bagian dari penutup kajian ini, disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis pada aspek implementasi lokal dari program-program penanganan perdagangan manusia yang difasilitasi oleh IOM maupun lembaga lainnya. Hal ini penting mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda-beda, yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kajian yang lebih fokus pada tingkat lokal dapat menggambarkan bagaimana norma dan kebijakan nasional atau internasional benar-benar diinternalisasi dan diterapkan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat setempat.

Selain itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan dan program juga merupakan ruang yang masih terbuka luas untuk dikaji lebih lanjut. Banyak program pencegahan, pelatihan, dan asistensi yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, namun belum banyak penelitian yang secara sistematis menilai hasil jangka panjangnya, baik dari sisi pengurangan jumlah kasus perdagangan manusia, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun keberlanjutan reintegrasi korban. Penelitian yang berorientasi evaluatif akan sangat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan program, serta menyusun strategi perbaikan ke depan.

Lebih lanjut, studi perbandingan antar negara juga direkomendasikan untuk memperluas pemahaman terhadap efektivitas intervensi anti-trafficking dalam berbagai konteks kebijakan. Misalnya, membandingkan peran IOM di Indonesia dengan di Filipina, Thailand, atau negara lain di Asia Tenggara dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu pendekatan. Dengan pendekatan komparatif, kajian serupa akan lebih mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk konteks regional dan global.